

RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Matakuliah: PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH		Semester: GENAP Kode: 1652 sks: 3			
Program Studi: Ilmu Pemerintahan		Dosen: Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si			
<p>Capaian Pembelajaran: untuk memberikan pemahaman dasar menyangkut perencanaan dan penganggaran yang meliputi perkembangan dasar hukum, proses penyusunan anggaran, struktur anggaran, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) serta RAPBD. Pemahaman mengenai dasar hukum dan proses penyusunan anggaran bersifat pengantar, sedangkan fokus pembahasan dititikberatkan pada materi struktur anggaran dan penyusunan RKA. Sementara itu, materi penyusunan RAPBD ditujukan untuk melengkapi pemahaman materi sebelumnya.</p>					
Ming ke-	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan kajian (materi pelajaran)	Bentuk Pembelajaran	Waktu (menit)	Kriteria Penilaian (indikator)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mahasiswa mampu memahami dengan baik desain pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) semester	Introduksi dan kontrak belajar: 1. Skema Peta konsep perencanaan dan penganggaran 2. Deskripsi singkat 3. Aturan perkuliahan dan penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya Jawab 	90	<ul style="list-style-type: none"> - mapat memahami dan menjelaskan konsep tentang perencanaan dan penganggaran daerah - komitmen pada aturan perkuliahan dan memahami sistem penilaian
2	Mahasiswa mampu memahami bagaimana proses dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah	Proses perencanaan penganggaran dan pembangunan daerah: 1. Tujuan utama perencanaan pembangunan 2. Prinsip-prinsip dan Tahapan	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya Jawab 	90	<ul style="list-style-type: none"> - dapat menjelaskan konsep pembangunan daerah - dapat menyebutkan tujuan & prinsip - dapat menjelaskan tahap-tahap dalam perencanaan pembangunan daerah
3	Mahasiswa mampu memahami hakekat, pengertian dan fungsi anggaran	Hakekat dan Logika Anggaran: 1. Dimensi-dimensi persoalan anggaran 2. Pengertian dan fungsi anggaran 3. Posisi dan kepentingan masyarakat dalam anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya Jawab 	90	<ul style="list-style-type: none"> - dapat menjelaskan pengertian anggaran dan fungsinya - dapat menjelaskan posisi masyarakat dalam penyusunan dan pemanfaatan anggaran

4	Mahasiswa mampu mengetahui dasar hukum pengelolaan keuangan daerah yang berlaku saat ini, berikut karakteristik pokok pengelolaan keuangan daerah saat ini	Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Dasar Hukum 2. Dasar Hukum PKD di Era Praotonomi dan Otonomi Daerah 3. Pengelolaan keuangan daerah 4. Esensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah 5. Pengelola keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya Jawab 	90	<ul style="list-style-type: none"> - dapat menyebutkan dasar hukum pengelolaan keuangan daerah, terutama yang berlaku sejak era otonomi daerah sampai saat ini. - dapat menjelaskan perubahan mendasar di dalam pengelolaan keuangan daerah setelah PP No. 105/2000 dan PP No. 58/2005 - dapat menjelaskan pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah - dapat menjelaskan pengertian pengelolaan keuangan daerah - dapat menjelaskan esensi perencanaan dan penganggaran daerah
5	QUIS 1 – Materi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses perencanaan penganggaran dan pembangunan daerah 2. Hakekat dan Logika Anggaran 3. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah 				
6	Mahasiswa mampu memahami proses penyusunan sampai dengan penetapan anggaran.	Proses Penyusunan dan Penetapan APBD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan fungsi anggaran 2. Pendekatan dalam penyusunan anggaran 3. Proses penyusunan APBD 4. Proses penetapan APBD 5. Asas Umum dan Prinsip Disiplin Anggaran 6. Format APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya Jawab 	90	<ul style="list-style-type: none"> - dapat menjelaskan pengertian anggaran daerah (APBD) - dapat menjelaskan fungsi anggaran. - dapat menjelaskan pendekatan dalam penyusunan anggaran - dapat menyebutkan langkah-langkah (proses) penyusunan anggaran - dapat menyebutkan langkah-langkah (proses) penetapan anggaran. - dapat menjelaskan azas umum anggaran - dapat menjelaskan prinsip disiplin anggaran

7	Mahasiswa mampu memahami struktur APBD, struktur anggaran SKPD, dan struktur anggaran PPKD berikut pengertian dari setiap elemen APBD (pendapatan, belanja dan pembiayaan)	Rincian Struktur APBD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Pendapatan 2. Struktur Belanja 3. Struktur Pembiayaan 4. Struktur anggaran PPKD 5. Struktur anggaran SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Contoh APBD • Tanya Jawab 	90	<ul style="list-style-type: none"> - dapat menjelaskan pengertian pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. - dapat menjelaskan struktur APBD secara ringkas - dapat menyebutkan klasifikasi pendapatan daerah - dapat menyebutkan klasifikasi belanja daerah - dapat menyebutkan klasifikasi pembiayaan daerah - dapat menjelaskan struktur anggaran SKPD - dapat menjelaskan struktur anggaran PPKD
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)				
9	Mahasiswa dapat memahami cara penganggaran anggaran SKPD ke dalam RKA SKPD dan anggaran PPKD ke dalam RKA PPKD secara umum. Sedangkan teknisnya penyusunannya yang dijelaskan pada kegiatan belajar ini hanya bersifat sebagai pengetahuan tambahan.	Penyusunan RKA SKPD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi RKA-SKPD 2. Komponen RKA-SKPD 3. Pedoman Penyusunan RKA SKPD 4. Pendekatan Penyusunan RKA SKPD Penyusunan RKA-PPKD : <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi RKA-PPKD 2. Komponen 3. Tata Cara Pengisian 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya Jawab 	90	<ul style="list-style-type: none"> - dapat menjelaskan fungsi RKA SKPD dan RKA PPKD - dapat menyebutkan komponen RKA SKPD dan RKA PPKD berikut kegunaan masing-masing jenisnya - dapat menyebutkan urutan penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD - dapat menjelaskan secara umum tatacara pengisian RKA SKPD dan RKA PPKD

10	Mahasiswa dapat memahami pihak-pihak yang terkait di dalam pembahasan RKA dan penyusunan RAPBD, serta langkah-langkah secara umum di dalam penyiapan penyusunan RPBD. Contoh format kelengkapan dokumen RAPBD dimaksudkan untuk memberikan gambaran sehingga dapat melengkapi pemahaman.	Penyusunan Rancangan APBD: 1. Pihak terkait 2. Proses penyusunan rancangan APBD 3. Dokumen kelengkapan rancangan APBD 4. Contoh	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya Jawab 	90	<ul style="list-style-type: none"> - dapat menyebutkan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan RAPBD - dapat menyebutkan kriteria yang digunakan TAPD dalam pembahasan RKA SKPD - dapat menyebutkan dokumen kelengkapan Ranperda APBD - dapat menyebutkan dokumen kelengkapan Ranperkada Penjabaran APBD
11	QUIS 2 – Materi : 1. Penyusunan RKA SKPD 2. Penyusunan RKA PPKD 3. Penyusunan Rancangan APBD				
12 - 14	Mahasiswa dapat memahami dan mampu melakukan analisis tentang kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi (APBD)	Analisis Keberhasilan Pemda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Derajat Desentralisasi Daerah : 1. Varians Pendapatan 2. Derajat Desentralisasi 3. Rasio Ketergantungan 4. Efektifitas dan Efisiensi PAD 5. Varians Belanja 6. Efektivitas dan Efisiensi Belanja 7. Rasio Belanja Daerah dengan PDRB	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Contoh Kasus • Kerjakan Soal 	270	dapat melakukan analisis keberhasilan suatu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dengan menggunakan analisis Derajat Desentralisasi Daerah
15	Review		<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Kumpulkan Tugas 	90	
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)				

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku/Literatur

- Agustina, Oesi, (2013). *Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
- Ash-Shiddiqy, Mohammad Hasbi. (2012). *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul*, Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Budi Mulyana (Widyaiswara STAN), 210. *Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Kementrian Keuangan RI- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2006. *Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002 . *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

- UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pengganti UU RI No 32/2004);
- UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (pengganti UU RI No. 25 Tahun 1999);
- PP RI No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (terakhir direvisi dengan PP RI No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP RI No. 24 Tahun 2004);
- PP RI No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- PP RI No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

PP RI No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

PP RI No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

PP RI No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pengganti PP RI No. 58 Tahun 2005)

Permendagri RI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (pengganti Permendagri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007)